PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN: SEBUAH ANALISIS WACANA KRITIS

Ronald Maraden Parlindungan Silalahi
Universitas Bunda Mulia
rsilalahi@bundamulia.ac.id; bomberrose@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki yang berperan sebagai suami dan perempuan yang berperan sebagai istri yang dibangun dengan bersandar pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang No 1 tahun 1974). Dalam perspektif kritis, perkawinan dipandang sebagai suatu tindakan sosial yang dilakukan guna menghasilkan suatu institusi sosial tertentu yang dinamakan keluarga. Dalam tataran implementasinya, perkawinan dibangun dengan bersandar pada nilai-nilai dan norma-norma tertentu. Sebagai negara yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia mendasarkan nilai-nilai dan norma-norma perkawinan dalam Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, Undang-undang ini dinilai mendiskriminasi kaum perempuan karena tidak berpihak dan mengesampingkan hak-hak perempuan (Wuryasti, 2016). Diskriminasi dan ketimpangan ini merupakan suatu bentuk ketidaksetaraan gender yang berlaku dalam perkawinan. Perempuan dalam hal ini tidak memiliki kesamaan hak dan kewajiban dibandingkan dengan kaum laki-laki. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dalam undang-undang perkawinan dan menganalisis bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dalam undang-undang tersebut. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan ancangan Analisis Wacana Kritis (AWK). Penelitian dilakukan atas Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Analisis dilakukan dengan bersandar pada model Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Fairclough (2010) yang menekankan pada tiga tahap analisis, yaitu analisis tekstual, interpretasi wacana, dan eksplanasi sosiokultural. Analisis tekstual dilakukan atas undang-undang perkawinan dengan merujuk pada tiga metafungsi bahasa yang dikembangkan oleh Halliday dan Matthiessen (2014) yang mencakupi metafungsi ideasional, interpersonal, dan tekstual. Interpretasi wacana dilakukan dengan berfokus pada peran-peran partisipan dalam proses pembentukan dan pengkomunikasian undang-undang perkawinan. Sementara itu, eksplanasi sosiokultural dilakukan dengan berfokus pada aspek-aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi pembentukan dan implementasi undang-undang perkawinan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik yang terkait dengan perkawinan dan peran perempuan.

Kata kunci: *Undang-undang perkawinan, Analisis Wacana Kritis, Perempuan, ketidaksetaraan, gender*

PENDAHULUAN

Perkawinan dimaknai sebagai suatu ikatan yang terbentuk melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berperan sebagai suami dan istri yang dibangun dengan nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan yang berlaku (Undang-undang perkawinan tahun 1973, Bab 1, Pasal 1). Dalam perspektif kritis, perkawinan diarahkan untuk membentuk suatu institusi sosial yang dinamakan keluarga dengan suami, istri, dan anak-anak yang berperan sebagai para partisipannya. Setiap partisipan memiliki peran-peran sosial yang berbeda. Misalnya, laki-laki memiliki peran sebagai suami dan juga kepala rumah tangga yang dalam implementasinya menentukan arah dan tujuan perkawinan dan keluarga. Oleh karena itu, perkawinan dibangun dengan bersandar pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, yang dalam hal ini mencakupi norma sosial dan keagamaan. Undang-undang no 1 tahun 1974 menegaskan bahwa pembentukan perkawinan sebagai suatu institusi sosial didasarkan kepada falsafah Pancasila dan cita-cita hukum nasional.

Pembentukan undang-undang tentang perkawinan pada dasarnya dapat dilihat dalam dua perspektif yang berbeda. Di satu sisi, pembentukan undang-undang perkawinan dapat menjadi landasan implementatif bagi seluruh warga Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain keberagaman agama dan kebudayaan yang acapkali menjadi landasan dalam suatu perkawinan tidak dapat disatukan sepenuhnya melalui kebijakan-kebijakan publik dalam tataran nasional. Setiap agama dan kebudayaan memiliki landasan normatif tertentu yang tidak sepenuhnya sama dan sejalan satu dengan yang lain.

Dalam pembentukannya undang-undang perkawinan terkesan melemahkan peran serta perempuan di dalam perkawinan. Kartikasari (sekretaris jenderal koalisi perempuan) menegaskan hal ini dan menyatakan bahwa kebijakan yang dibentuk acapkali tidak memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan keadilan *gender* (Tashandra, 2016). Perempuan diperlakukan tidak setara, lebih rendah, dan seolah menjadi kaum dalam lapis kedua pada struktur sosial yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan-tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial ini.

Menilik pada banyaknya masalah ketidakadilan *gender* yang cenderung melemahkan peran serta perempuan dalam undang-undang perkawinan dan menelisik pentingnya tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan sosial ini, tulisan ini diarahkan untuk menggambarkan perempuan dalam undang-undang perkawinan. Tulisan ini disusun dengan bersandar pada landasan dan ancangan analisis wacana kritis yang mengelaborasi hubungan antara analisis teks dalam perspektif Linguistik Fungsional Sistemik (LFS) dan analisis kontekstual. Kedua dimensi analisis tersebut dilakukan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berperan sebagai data primer dan teks-teks lainnya yang berperan sebagai data sekunder. Data sekunder yang dimaksud mencakupi pernyataan, pandangan, atau bahkan kebijakan lainnya yang memperkuat atau melemahkan peran serta perempuan seperti yang terjadi di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Analisis linguistik dalam perspektif linguistik fungsional sistemik dilakukan dengan berfokus pada tiga metafungsi bahasa, yaitu ideasional, interpersonal, dan tekstual. Metafungsi ideasional berfokus pada penggambaran pengalaman manusia melalui elemen-elemen kebahasaan (Halliday dan Matthiessen, 2014). Penggambaran ini tercermin melalui peranti linguistik, seperti leksikalisasi (penggunaan kata), pola transitivitas (hubungan antara partisipan, proses, dan keadaan di dalam konstruksi sintaksis), dan nominalisasi (pembentukan nomina dari elemen linguistik lainnya yang berbeda). Metafungsi interpersonal berfokus pada hubungan antarpartisipan komunikasi yang tercermin melalui persona dan jarak sosial yang dibangun (Halliday dan Matthiessen, 2014; Silalahi, 2017). Metafungsi ini tercermin dari modus (pengklasifikasian kalimat sesuai dengan makna yang dibangun oleh partisipan komunikasi) dan modalitas (penggunaan pengungkap modalitas di dalam suatu kalimat). Di samping itu, Halliday dan Matthiessen (2014) juga mengungkapkan mengenai metafungsi tekstual yang berfokus pada peran bahasa dalam interaksi sosial. Metafungsi ini tercermin dari konstruksi aktif dan pasif, struktur tematis (hubungan tema dan rema), struktur informasi (hubungan antara informasi lama dan baru), dan perangkat kohesi.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan ancangan analisis wacana kritis. Oleh karena itu, teks diposisikan sebagai suatu produk tindakan sosial. Hal ini berimplikasi pada adanya relasi kekuasaan yang terbentuk di dalam masyarakat. Proses analisis dilakukan dengan merujuk pada model analisis wacana kritis yang dimodelkan oleh Fairlough (1989) yang menekankan pada tiga dimensi analisis, yaitu deskripsi teks, interpretasi wacana, dan eksplanasi sosiokultural. Deskripsi teks digunakan untuk membongkar realitas yang dibangun didalam teks dengan berfokus pada analisis tiga metafungsi kebahasaan (ideasional, interpersonal, dan tekstual). Ketiga metafungsi ini, direfleksikan oleh sejumlah peranti kebahasaan, seperti leksikalisasi, transitivitas, nominalisasi, modus, modalitas, struktur aktif dan pasif, struktur tematis, struktur informasi, dan perangkat kohesi. Penulis akan berfokus pada kekerapan penggunaan elemen kebahasaan di dalam teks. Kekerapan ini menjadi landasan untuk menemukan gagasan-gagasan yang mendapatkan penekanan di dalam teks.

Analisis pada tataran wacana berfokus pada penginterpretasian peran-peran partisipan di dalam teks. Analisis ini mencakupi pemroduksi, penerima, dan interpretasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan intitusi yang terlibat dalam pembentukan undang-undang dan relasi kekuasaan yang dibangun melalui hubungan tersebut. Analisis pada tahap ini dilakukan untuk dapat menggambarkan pihak-pihak yang secara sosial dan institusional memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan undang-undang perkawinan.

Analisis pada dimensi ketiga menekankan pada hal-hal sosial dan kebudayaan yang mempengaruhi pembentukan undang-undang perkawinan. Hal ini dilakukan melalui penelidikan atas teks-teks yang melatari pembentukan kebijakan tersebut, seperti peristiwa sosial dan sejarah yang memiliki kaitan yang erat dengan undang-undang tersebut. Ketiga dimensi analisis di atas dilakukan secara bertahap dimulai dari dimensi teks, dimensi wacana, dan dimensi sosiokultural.

ANALISA

Analisis dibagi dalam tiga tahap, yang dalam hal ini mencakupi deskripsi teks, interpretasi wacana, dan eksplanasi sosiokultural, seperti dalam penjabaran di bawah ini.

a. Deskripsi Teks

Sebagai suatu institusi sosial, perkawinan memiliki dua partisipan yang terlibat, yaitu laki-laki atau pria yang berperan sebagai suami dan perempuan dan wanita yang berperan sebagai istri. Dalam data primer,

kedua pihak ini diwakilkan masing-masing oleh kata 'pria' dan 'suami' serta 'wanita' dan 'isteri'. Ditinjau dari tingkat pemunculannya dapat disimpulkan bahwa kata yang berkaitan dengan 'perempuan' dan 'istri'; mendapatkan penekanan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kata 'pria' dan 'suami'. Penulis menemukan 6 kali pemunculan kata 'wanita' dan 43 kali pemunculan kata 'isteri' di dalam teks. Sementara itu, kata 'wanita' muncul sebanyak 8 kali dan 'isteri' sebanyak 54 kali. Ditelisik dari tingkat pemunculannya, dapat dilihat bahwa perempuan dan peran serta isteri menjadi fokus pembicaraan yang mendominasi penyampaian seluruh informasi di dalam undang-undang tersebut.

Dalam konstruksi kalimat, kata isteri cenderung berada diposisi objek kalimat, seperti dalam kalimat pada Bab 1, Pasal 3 undang-undang perkawinan berikut ini.

- *Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.*
- *Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang(Isteri) apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.*

Kata 'isteri' sebagai objek kalimat menekankan pada hal-hal yang dapat dilakukan oleh subjek terhadap 'perempuan'. Dalam konstruksi kalimat subjek yang dimaksud umumnya diisi oleh peran laki-laki atau suami.

Disamping itu, penulis juga menemukan 49 konstruksi frasa yang menekankan kesetaraan dalam peran serta suami dan (atau) isteri. Hal ini ditandai dengan frasa 'suami isteri' yang muncul secara bersamaan di dalam kalimat, seperti dalam contoh berikut ini.

- *Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.*

Dapat dipahami bahwa pada hakikatnya pembuatan undang-undang ini tentunya mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. Hal tersebut terlihat secara nyata dari tingginya penggunaan frasa yang memasukkan kedua pihak tersebut secara merata. Akan tetapi, hal tersebut dilemahkan oleh kalimat-kalimat yang memposisikan kata 'isteri' sebagai subjek kalimat, seperti dalam pasal 4 ayat 2 berikut ini.

- *Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:*
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Dalam kutipan di atas dapat dilihat bahwa suami dapat melakukan pernikahan kembali apabila istri tidak melakukan syarat-syarat tertentu, seperti menjalankan kewajiban isteri, cacat, dan tidak dapat memberikan keturunan. Akan tetapi, ketentuan yang senada tidak diberikan kepada suami. Dengan perkataan lain, isteri tidak memiliki otoritas yang sama dalam pernikahan. Hal ini juga seolah menegaskan bahwa laki-laki dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu karena ketidakberhasilan isteri. Hal senada dapat juga dilihat dalam penjelasan undang-undang tentang Perkawinan tahun 1973 di bawah ini.

- *Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.*

Melihat pemaparan pada kalimat pertama di atas dapat dilihat bahwa kutipan di atas disampaikan dalam konteks pernikahan di bawah umur yang berdampak pada masalah kependudukan. Akan tetapi, terdapat ketidakkonsistenan antara kalimat tersebut dengan butir kalimat terakhir yang justru menumpukkan kesalahan kependudukan hanya pada wanita yang menikah di bawah umur. Pernikahan dini yang dilakukan perempuan berdampak buruk untuk mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Akan tetapi, hal ini justru tidak dikaitkan dengan kaum pria yang juga dapat melakukan pernikahan di usia dini.

b. Interpretasi Wacana

Dalam konteks wacana dapat dilihat bahwa pembuatan undang-undang pernikahan adalah untuk menjawab masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dalam suatu pernikahan. Hal ini dibangun dengan kesadaran mengenai pentingnya suatu bentuk mekanisme pengawasan yang menentukan dan mengarahkan pernikahan. Republik Indonesia (dalam undang-undang perkawinan) melalui presiden Republik Indonesia membatasi masyarakat Indonesia dengan sejumlah peraturan yang harus dijalankan. Apabila ketentuan-ketentuan ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan ada dampak yang akan diterima oleh pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Sebagai suatu bentuk komunikasi politik, dapat dilihat bahwa pemerintah melalui presiden Indonesia memiliki peran sebagai pengirim pesan. Penerima pesan dalam hal ini terdiri atas dua pihak, yaitu masyarakat Indonesia dan institusi-institusi lainnya yang menaungi perkawinan, seperti departemen agama.

Relasi kekuasaan yang terjalin antara pemerintah (*superordinat*) dan institusi-institusi sosial yang ada dibawahnya (*subordinat*) melalui relasi yang bersifat mengikat. Institusi-institusi tersebut diharuskan mengikuti norma-norma dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan apakah nilai-nilai tersebut sesuai dengan norma-norma yang dimiliki atau yang berlaku di dalam institusi-institusi tersebut. Sebagai contoh, perceraian dan poligami adalah hal-hal yang tidak dapat diterima dalam nilai-nilai kekristenan, tetapi terfasilitasi melalui undang-undang perkawinan dengan ketentuan-ketentuan yang dimilikinya. Terlihat secara nyata bahwa undang-undang perkawinan tidak konsisten dan cenderung bergerak dari atas ke bawah (*top down*). Hal yang sama juga berlaku dalam konteks individual. Sebagai contoh seorang istri tidak memiliki otoritas untuk dapat memutuskan apakah anak yang dimilikinya tidak sah sebagai anak dari suaminya sendiri. Hal ini mempertegas adanya ketidaksetaraan antara pria (suami) dan wanita (istri) dalam institusi pernikahan menurut undang-undang tersebut.

c. Eksplanasi sosiokultural

Ihromi (1999) menyatakan bahwa pembentukan undang-undang perkawinan pada dasarnya tidak terlepas dari realitas bahwa keluarga adalah institusi sosial yang rawan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya yang ada. Walaupun dibentuk dalam konstruksi sosial yang kecil, nilai-nilai yang dibangun di dalam keluarga memiliki peran yang besar di dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk melindungi dan membentengi keluarga dari nilai-nilai dan norma-norma yang tidak sesuai dengan kaidah keagamaan dan sosial yang berlaku umum di Indonesia.

Keinginan untuk memiliki undang-undang perkawinan telah ada semenjak era kolonisasi belanda, jepang hingga era kemerdekaan. Dari awal pembentukannya undang-undang perkawinan pada tahun 1974 tidak terlepas dari berbagai polemik. Soewondo (1992) dan Muhammad (2018) menyatakan bahwa polemik pembentukan undang-undang perkawinan dimulai dari sidang parlemen tahun 1967-1971 yang merumuskan RUU Perkawinan bagi umat islam. Hal ini mendapatkan penolakan dari berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR). Salah satu di antaranya adalah fraksi Katolik. Penolakan juga dilakukan oleh kaum cendekia islam yang merasa kebijakan yang dibentuk tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan hukum islam (Soewondo, 1992; Muhammad, 2018). Dalam perspektif ini, dapat dilihat bahwa pada hakikatnya pembentukan undang-undang perkawinan tidak dilakukan secara demokratis dan tidak sesuai nilai-nilai luhur Pancasila yang berfokus pada nilai-nilai keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tujuan memperkuat nilai-nilai luhur Pancasila, undang-undang perkawinan justru semakin melemahkan nilai-nilai luhur yang dimiliki Pancasila.

Undang-undang perkawinan dibentuk dengan mempertimbangkan dua landasan yuridis, yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Kedua landasan ini menekankan pada dua aspek yang mendasar, yaitu aspek Ketuhanan yang maha Esa dan aspek keadilan. Dapat dilihat bahwa perkawinan dalam perspektif undang-undang perkawinan tahun 1973 menekankan pada nilai-nilai religiositas yang menjadi landasan ideologis Pancasila dileburkan dalam konteks perkawinan dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Perkawinan adalah suatu ikatan yang menjembatani hubungan antara manusia. Perbedaan gender dijematani melalui institusi perkawinan. Oleh karena itu, seharusnya undang-undang perkawinan dapat menjembatani berbagai perbedaan karena pembentukan undang-undang di Indonesia diarahkan untuk membentuk masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Akan tetapi, nilai-nilai luhur dibalik

pembentukan undang-undang perkawinan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan mengingat besarnya keragaman yang harus dipersatukan dalam undang-undang tersebut. Analisis teks menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan dibentuk dengan mempertimbangkan peran serta masyarakat dalam proses pembentukannya. Usaha untuk mendukung nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dilakukan dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang setara di dalam norma hukum. Akan tetapi, azas keadilan ini dilemahkan oleh sistem perundang-undangan yang tidak memperkuat otoritas perempuan di dalam pernikahan. Hal ini juga seolah menegaskan bahwa laki-laki dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu karena ketidakberhasilan istri atau hal-hal yang dilakukan dan dialami oleh isterinya. Bahkan dalam sejumlah kutipan dapat dilihat bahwa adanya peran serta kaum perempuan dan istri dalam menghadirkan masalah sosial dan kependudukan. Masalah-masalah tersebut disisi lain tidak dibebankan kepada laki-laki. Dalam perpektif wacana dapat dilihat adanya relasi kekuasaan yang terbentuk. Pemerintah melalui kekuasaan politis dan sosial yang dimilikinya mempersuasikan institusi-institusi yang ada dibawahnya untuk menjalankan kebijakan-kebijakan politik tanpa mempertimbangkan adanya keragaman di Indonesia. Hal ini seolah mempertegas sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat top-down bergerak dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan terkesan memaksakan dalam tataran implementasinya. Undang-undang perkawinan cenderung berpihak pada kaum mayoritas dan mengurangi nilai-nilai demokratis yang terkandung dalam Pancasila. Analisis dalam tataran sosio-kultural seolah mempertegas hal ini. Dalam proses pembentukannya, undang-undang perkawinan tidak terlepas sepenuhnya dari polemik-polemik. Kekuasaan menjadi jawaban agar perbedaan-perbedaan yang harus dipersatukan dalam undang-undang perkawinan.

REFERENCES

- Fairclough, N. 2010. *Critical discourse analysis. The critical study of language*. Harlow: Longman.
- Fairclough, N. 1989. *Language and power*. London: Routledge.
- Halliday, M.A.K. dan Matthiessen, Christian. 2014. *Halliday's introduction to functional grammar*. (Ed. Ke-4). London: Routledge.
- Majelis Permusyawaratan Indonesia. 1983. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Nomor: IV/MPR/1983 tentang Referendum. Diakses dari <http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/83TAPMPR-IV.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. 1945. Undang-undang Dasar 1945. Diakses dari <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. 1974. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses dari <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>
- Tashandra, N. 2016. Diskriminasi Gender, Tujuh UU Terkait Perempuan Ini Perlu Diubah. <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/06/17335421/Diskriminasi.Gender.Tujuh.UU.Terkait.Perempuan.Ini.Perlu.Diubah> 20:21 10 Maret 2018
- Wuryasti, F. 2016. UU Perkawinan Mendiskriminasi Perempuan. Diakses dari <http://www.mediaindonesia.com/news/read/32638/uu-perkawinan-mendiskriminasi-perempuan/2016-03-06>
- Soewondo, N. 1992. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ihromi, T.O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Muhammad, N. 2018. *Sejarah Hukum perkawinan di Indonesia*. https://www.academia.edu/3797838/SEJARAH_HUKUM_PERKAWINAN_DI_INDONESIA_PENDAH_ULUAN?auto=download 21:24 10 Maret 2018.
- Silalahi, R.M.P. 2017. *Konsep Pendidikan dalam Pidato Presiden Republik Indonesia Masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru: Sebuah Analisis Wacana Kritis*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya-Universitas Indonesia.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ronald Maraden Parlindungan Silalahi

Institusi : Universitas Bunda Mulia

Pendidikan :

★ Strata satu, Sastra Inggris, Universitas Kristen Maranatha

★ Strata dua, Ilmu Linguistik, Universitas Indonesia

★ Strata tiga, Ilmu Linguistik, Universitas Indonesia

Minat Penelitian :

★ Analisis Wacana Kritis

★ Semiotika

★ Sociolinguistics